



Analisis Pembiayaan Sektor Pendidikan Dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota *Analysis of Financing in Education Sector and Human Development Index in Regencies/City*

Rio Hermawan¹⁾, Muhammad Amir Arham²⁾, Sri Indriyani S. Dai³⁾

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo^{1,2)}

email: sriindriyani_dai@ung.ac.id

Disubmit: 26 Januari 2022; Direvisi; 24 Maret 2022; Dipublish; 26 April 2022

Abstract

The research aims to analyze the effect of financing in education sector by utilizing data from statistics of Gorontalo Province from 2015 to 2019 in five regencies and one city administration in Gorontalo Province. Therefore, the proper analysis tool to use is panel data regression and fixed effect model (FEM). The result of analysis shows that there is a positive and significant effect of financing in education sector on the human Development Index as an increase in the financing will lead to an increase in the Human Development Index too. In addition, the control variable used is Gross Participation Rate (APK) for senior High School owns a negative and insignificant effect on the human development Index. In the meantime, the Net participation Rate (APM) for senior High School owns a positive and significant effect on the increase of Human Development Index. Additionally, the use of education budget requires to be increased whether in measurable planning process distribution or productive spending. Therefore, it is indispensable to perform sustainable monitoring and evaluation from all stakeholders.

Keywords : *Education, Human Development Index*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dalam penelitian ini memanfaatkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo rentang periode 2015-2019 untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Gorontalo maka alat analisis yang tepat menggunakan *panel data regression, fixed effect model* (FEM). Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pembiayaan sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan pembiayaan sektor pendidikan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Variabel kontrol yang digunakan yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA memberikan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pemanfaatan anggaran pendidikan perlu ditingkatkan baik dari sisi proses perencanaan yang terukur, penyaluran sampai pada belanja yang produktif. Tentu perlu monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan.

Keywords : Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia

1. PENDAHULUAN

Menjelang tahun 1990 fokus perhatian dunia berubah yang awalnya hanya mengandalkan pembangunan ekonomi menjadi pembangunan manusia. Seiring dengan hal tersebut, dunia sudah mulai menyadari arti penting manusia tidak hanyasebagai input dan juga sebagai alat dalam pembangunan namun lebih dari itu yakni manusia menjadi input sekaligus tujuan dalam pembangunan. Argumentasi ini muncul disebabkan oleh banyaknya negara-negara di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi disertai dengan tingginya kemiskinan dan pengangguran, rendahnya tingkat kesehatan, dan berbagai masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia (BPS, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan aspek lain dalam kehidupan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dibangun dengan pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (UNDP, 2019). Kemajuan dalam pembangunan manusia memiliki dua perspektif yakni pencapaian yang menggambarkan apa yang telah dicapai, dan kecepatan perubahan pembangunan manusia.

Indonesia telah menggunakan tiga komponen dalam pembentukan indeks pembangunan manusia yaitu pertama adalah umur panjang serta hidup sehat yang merupakan salah satu indikator harapan hidup saat lahir. Pentingnya harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa

umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor tidak langsung yang berkaitan erat dengan harapan hidup (seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik), kedua adalah pengetahuan, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah yang merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan untuk kehidupan produktif dalam masyarakat modern. Harapan lama sekolah ini merupakan sebuah gambaran bagi Masyarakat untuk memiliki kesempatan menempuh jenjang Pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah, dan ketiga dari pembangunan manusia adalah penguasaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak. UNDP menggunakan data PNB yang merupakan singkatan dari Pendapatan Nasional Bruto sebagai indikator dimensi ini. Akan tetapi, mengingat tidak semua wilayah di Indonesia memiliki indikator tersebut, maka dipilih alternatif lain dengan memanfaatkan indikator pendapatan/pengeluaran. Indikator ini tersedia hingga level wilayah kabupaten/kota. Pertimbangan lebih lanjut adalah bahwa indikator tersebut harus mencerminkan *diminishing return* untuk mengubah pendapatan/pengeluaran menjadi kemampuan manusia. Dengan kata lain, manusia tidak perlu sumber daya keuangan yang berlebihan untuk memastikan kehidupan yang layak. Aspek ini diperhitungkan dengan menggunakan logaritma pengeluaran per kapita yang mencerminkan indikator pendapatan (BPS, 2019).

Dalam penelitian Rakhmadhani (2018) dengan judul “analisis pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb), kesenjangan antar daerah dan pembiayaan sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) kabupaten/kota di provinsi jawa timur” menjelaskan bahwa pembiayaan sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia”. Hal ini mengindikasikan bahwa ada pendidikan merupakan modal utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Gorontalo diproyeksikan sebanyak 1.219.576 jiwa. Jumlah tersebut bertambah 174.762 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk melalui sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 1.044.814 jiwa. Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo mencapai 1.73 persen setiap tahunnya (BPS Gorontalo, 2019). Cepat lambatnya pembangunan Gorontalo akan sangat ditentukan pada modal satu juta penduduk tersebut. Dengan *human capital* yang berkualitas tentu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara simultan. Pemerintah menyadari peningkatan kualitas penduduk sangatlah penting, tekad pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas penduduk tercermin dalam visinya yakni terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera.

Dalam kurun 2011-2019 rata-rata pertumbuhan IPM Gorontalo sebesar 0.95 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Gorontalo paling tinggi terjadi pada periode 2018-2019 yang mencapai 1.15 persen dan penurunan IPM paling rendah pada tahun 2015-2016 yang hanya tumbuh sebesar 0.66 persen. Di akhir tahun 2012 IPM Gorontalo hanya sebesar 64.16 terus mengalami peningkatan secara nominal hingga tahun 2019 IPM Gorontalo mencapai 68.49 (BPS, 2019).

Peningkatan IPM Gorontalo ini meskipun mengalami peningkatan namun rata-rata pertumbuhannya Cuma 0.95 persen yang berarti bahwa

tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2010. Masalah berikutnya yang menjadi tantangan adalah semua komponen pembentuk IPM Gorontalo mengalami peningkatan namun tidak dibarengi dengan tingkatan kecepatan pertumbuhan yang signifikan dan peningkatannya juga cenderung beragam di tiap komponennya.

Dimensi IPM pertama yakni umur panjang dan hidup sehat yang di proksi dengan umur harapan hidup saat lahir, selama periode 2011-2019 Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Pertumbuhan UHH paling tinggi terjadi pada periode 2018-2019 yakni sebesar 0,71 persen lebih cepat dibanding periode sebelumnya yakni sebesar 0,46 persen (BPS Gorontalo, 2019). Peningkatan UHH saat lahir mengindikasikan bahwa harapan hidup seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Capaian UHH Gorontalo masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian UHH di provinsi lain. Secara nasional, UHH Indonesia tahun 2019 telah mencapai 71,34 tahun, sementara UHH Gorontalo baru mencapai 67,93 tahun.

Sementara itu untuk dimensi pengetahuan yang diproksi dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tercatat secara nominal sama-sama meningkat namun pertumbuhannya berbeda. Tercatat, indikator harapan lama sekolah tumbuh lebih cepat dibandingkan indikator rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 1,41 persen per tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah sekolah tumbuh rata-rata sebesar 1,39 persen per tahun. Peningkatan pada rata-rata lama sekolah cenderung lebih landai dibandingkan peningkatan pada harapan lama sekolah (BPS, 2019).

Harapan lama sekolah di Gorontalo meningkat dari 11,68 tahun (2011) menjadi 13,06 tahun (2019). Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo meningkat dari 6,85 tahun (2010) menjadi 7,69 tahun (2019). Dimensi pengetahuan juga berkaitan dengan kinerja pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Kedua indikator ini digunakan sebagai monitoring dari pembangunan terutama di bidang pendidikan.

Selain komponen IPM yang mengalami perlambatan, masalah berikutnya adalah tingkat kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di dalam Provinsi Gorontalo. Meskipun disparitas IPM Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo masih relatif kecil, namun nilai tengah (median) IPM-nya mengumpul di level IPM kategori sedang yakni $60 \leq \text{IPM} < 70$. Argumentasi yang bisa menjelaskan hal ini karena Sebagian besar IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berkisar di level 60-an. Hanya Kota Gorontalo saja yang nilai IPM di atas 70 atau termasuk kategori tinggi. Pada tahun 2011, selisih antara IPM yang terendah dengan yang tertinggi sebesar 13,71 sedangkan ditahun 2019 selisihnya mengecil menjadi 12,56. Jika pada tahun 2011 Kabupaten Pohuwato memiliki capaian IPM terendah, di tahun 2019 IPM terendah ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara (BPS, 2019).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang komprehensif tentang analisis pembiayaan sektor pendidikan dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan alat analisis regresi dengan

model regresi yang digunakan untuk menguji Hipotesis dari data yang terukur sehingga diperoleh pengaruh perubahan dari suatu variabel belanja pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi objek Penelitian ini yaitu enam (6) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo yang menggunakan data dengan kurun waktu tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengambilan data dari lembaga yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik dan pustakalainnya yang digunakan sebagai pelengkap dengan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Analisis data menggunakan model estimasi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan, APM SMA dan APK SMA terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah model data panel yang merupakan gabungan *cross sectional data* (enam kabupaten/kota) dan *time series data* (kurun waktu 2015-2019).

$$IPM_{it} = \varphi_0 + \varphi_1 \text{LogBPend}_{it} + \varphi_2 \text{APMSMA}_{i,t} + \varphi_3 \text{APKSMA}_{it} + \mu$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemilihan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM)

Untuk memilih model estimasi regresi antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* maka dilakukan dengan Uji Chow (Chow Test). Uji Chow ini mengikuti distribusi *cross-section F* dan *chi-squares* (χ^2) dengan *degree of freedom* (df) yang didapatkan dari *output* regresi. Untuk menentukan apakah model yang tepat antara FEM dan CEM juga dilihat dari nilai *cross-section F*. Jika nilai *chi-squares* (χ^2) > *chi-squares* (χ^2) pada tabel maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Namun ketika nilai *chi-squares* (χ^2) < *chi-squares* (χ^2) pada tabel maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (FEM). Jika nilai *cross-section F* > F tabel maka model yang tepat adalah model *Fixed Effect Model* (FEM) dan sebaliknya jika nilai *cross-section F* < F tabel maka model yang paling tepat adalah *Common Effect Model* (CEM) (Widiarjono, 2013)

Tabel 1. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
	201.49863		
Cross-section F	8	(5,21)	0,000

Sumber: Data diolah (2021)

Dari hasil Uji Chow di atas menunjukkan bahwa nilai *chi-squares* (χ^2) > *chi-squares* (χ^2) pada tabel (1% = 15,09 dan 5% = 11,07 sedangkan 10% = 9.24) dengan nilai probability (p-value) = 0,0000 yang lebih rendah dari taraf signifikansi (a = 0,05) maka model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Pemilihan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM)

Setelah melakukan *Likelihood Ratio* (Uji Chow) dan didapat bahwa model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM) maka selanjutnya melakukan pemilihan model antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* dengan menggunakan Uji Hausman (*Hausman Specification Test*).

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	d.f	Prob.
	901.25345		
Cross-section Random	6	5	0,000

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil pengujian Hausman maka untuk nilai *Chi-Square statistik* > *Chi-Square* tabel pada seluruh taraf signifikansi. Nilai *Chi-Square* dengan $df=5$ pada tabel 1% = 15,09 dan 5% = 11,07 sedangkan 10% = 9.24. Dari nilai *Chi-Square* di atas yakni 0.0000 yang lebih besar dari nilai *Chi-Square* tabel dan nilai Probability < 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

c. Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model*, maka model empiris yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Estimasi Model IPM

Variable	Coefficient	Prob(t-stat)
C	44.984	0.0000
Log(BPend)	0.756	0.0012***
APKSMA	-0.008	0.6566
APMSMA	0.054	0.0225**
<i>Adjusted R-squared</i>	0.979101	
<i>F-statistic</i>	170.8320	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000	
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.516431	

Sumber: Data diolah (2021)

Secara rata-rata IPM Kabupaten/Kota akan bernilai 44.984 tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun. Belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM, peningkatan belanja pendidikan sebesar satu persen akan meningkatkan IPM sebesar 0.756 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA berpengaruh negatif terhadap IPM, peningkatan APK sebesar satu persen akan menurunkan IPM sebesar 0.008 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA berpengaruh positif terhadap IPM, peningkatan APM SMA sebesar satu persen akan meningkatkan IPM sebesar 0.0549 persen (*ceteris paribus*).

Nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 0.979101. Nilai ini berarti bahwa sebesar 97.91 persen perubahan variabel Indeks Pembangunan Manusia dari enam kabupaten/kota yang diamati selama tahun 2015-2019 dipengaruhi oleh belanja pendidikan, Angka Partisipasi murni SMA, dan Angka Partisipasi Kasar SMA sedangkan sisanya sebesar 2.09% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

d. Uji F

Selanjutnya dalam menguji kesesuaian model digunakan statistik uji F untuk mengambil kesimpulan apakah secara bersama-sama variabel eksogen dalam model dapat menggambarkan hubungan linear dengan variabel endogen. Diperoleh nilai statistik uji F sebesar 170.8320. Adapun nilai F-tabel pada tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10% pada derajat bebas $df_1 = k - 1 = 4$ dan $df_2 = 36 - 5 - 1 = 30$ adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji F

df1	df2	α	F-tabel	F-hitung	Kesimpulan
4	30	1%	4.02	170.8320	Signifikan
		5%	2.69		Signifikan
		10%	2.14		Signifikan

Sumber; Data diolah (2021)

Jika dibandingkan maka nilai F-hitung yang diperoleh masih lebih besar dari nilai F-tabel pada seluruh tingkat signifikansi sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pendidikan, Angka Partisipasi Murni SMA, Angka Partisipasi Kasar SMA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di enam kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo selama tahun 2015-2019.

e. Uji T

Secara eksplisit hasil pengujian signifikansi pengaruh setiap variabel terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Uji T

Variabel	P-Value	Kesimpulan
Belanja Pendidikan	0.0012	Signifikan
APK SMA	0.6566	Tidak Signifikan
APM SMA	0.0225	Signifikan

Sumber: Data diolah (2021)

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui nilai *p-value* untuk variabel belanja pendidikan adalah sebesar 0.0012. Jika nilai *p-value* dibandingkan dengan seluruh taraf signifikansi α maka nilai *p-value* yang diperoleh masih lebih kecil dari seluruh α sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM selama tahun 2015-2019.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui nilai *p-value* untuk variabel APK SMA adalah sebesar 0.6566. Jika nilai *p-value* dibandingkan dengan seluruh taraf signifikansi α maka nilai *p-value* yang diperoleh masih lebih besar dari seluruh tingkat signifikansi α sehingga H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APK SMA tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM selama tahun 2015-2019.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui nilai *p-value* untuk variabel indeks pembangunan manusia adalah sebesar 0.0225. Jika nilai *p-value* dibandingkan dengan taraf signifikansi α 5% maka nilai *p-value* yang diperoleh masih lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APM SMA berpengaruh signifikan terhadap IPM selama tahun 2015-2019.

f. Pengujian Model Validasi Asumsi Klasik

1. Pengujian Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	R-Square	VIF
Belanja Pendidikan	0.162352	1.140
APK SMA	0.703081	3.367
APM SMA	0.720249	3.574

Sumber : Data Diolah, 2021

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai dari VIF dari kedua variabel independen kurang dari sepuluh ($VIF < 10$) maka dengan demikian, dalam model tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen

2. Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

R-squared	0.519159	Mean dependent var	0.593359
Adjusted R-squared	0.335982	S.D. dependent var	0.322981
S.E. of regression	0.290641	Sum squared resid	1.773911
F-statistic	2.834191	Durbin-Watson stat	2.500896
Prob(F-statistic)	0.026538		

Sumber : Data Diolah, 2021

F-statistic yang diperoleh dari hasil di atas yakni 2.834191. Sedangkan untuk F- tabel dengan $df_1 = k - 1 = 5 - 1 = 4$ dan $df_2 = 36 - 5 - 1 = 30$ pada taraf signifikansi 0,05 adalah 2,69. Jika dibandingkan maka F-tabel masih lebih besar dari F-statistic ($F\text{-stat} > F\text{-tabel}$) maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

3. Uji Autokorelasi

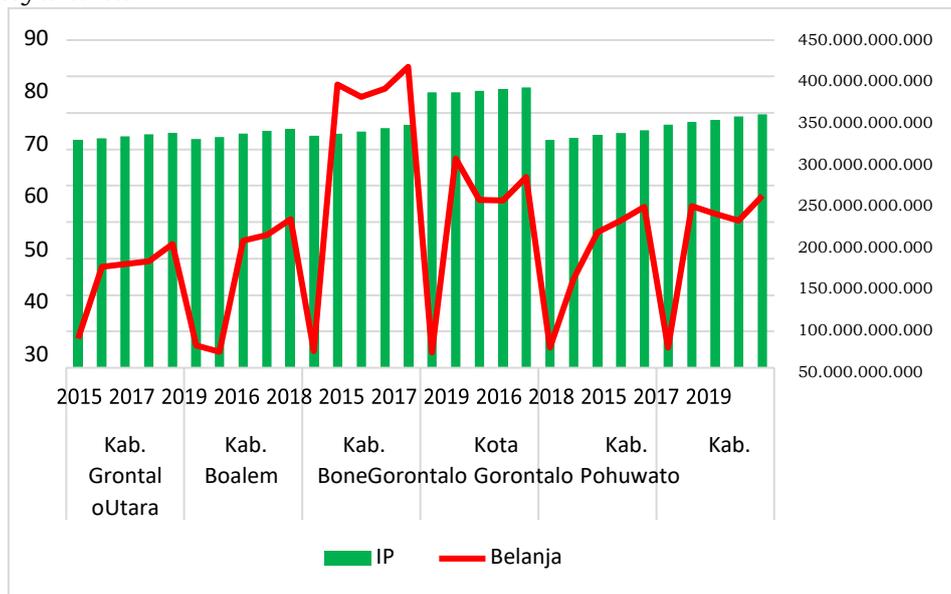
Dari hasil analisis diatas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.516431. Nilai ini berada di antara 1.21 dan 1.65, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Namun dengan pertimbangan bahwa model regresi yang diperoleh dalam penelitian ini tidak digunakan untuk melakukan forecasting/peramalan maka dampak autokorelasi ini dapat diabaikan.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan bahwa belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota selama 2015-2019. Belanja di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan output di bidang pendidikan. Signifikannya pengaruh belanja Pendidikan terhadap IPM dimungkinkan meningkatnya anggaran

Pendidikan disertai dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja menurut fungsi Pendidikan ini akan berdampak pada semakin tingginya tingkat pengetahuan dan Pendidikan masyarakat.



Gambar 1. IPM dan Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota 2015-2019 (Sumber: BPS, 2020)

Bila melihat grafik di atas, di setiap kabupaten kota dari tahun 2015 hingga tahun 2019 anggaran di bidang pendidikan terpantau meningkat setiap tahunnya, hal ini juga diikuti oleh peningkatan IPM kabupaten/kota. Hal ini ditengarai menjadi pemicu IPM meningkat.

Argument berikut mengapa belanja pendidikan mampu meningkatkan IPM dimungkinkan belanja pendidikan tersebut banyak dimanfaatkan untuk membangun ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama (dalam BPS, 2020) pada tahun 2019 di Provinsi Gorontalo terdapat 1.043 SD/MI, 410 SMP/MTs, dan 164 SMA/SMK/MA. Selain belanja untuk membangun sekolah, belanja pendidikan di Kabupaten/Kota juga diperuntukkan untuk membiayai ketersediaan tenaga pengajar yang cukup, karena hal ini merupakan salah satu faktor penunjang penting dalam meningkatkan mutu siswa dan siswi. Rasio guru dan siswa menjadi komponen yang dapat menciptakan kualitas kegiatan pengajaran. Standar rasio siswa-guru yang baik adalah 20. Provinsi Gorontalo secara keseluruhan memiliki rasio murid-guru yang baik pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas.

Meski demikian, masih ditemukan banyaknya guru honorer di daerah yang masih digaji di bawah standar minimum. Anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa minimal APBD dan APBN mengalokasikan 20% dari total APBD untuk pendidikan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada di Sebagian wilayah di Indonesia yang belum mengalokasikan 20% dari APBD untuk pendidikan. Peningkatan pada belanja pendidikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika kualitas manusianya produktif (Arham &

Dai, 2019).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahulauw et al., (2017) yang menyimpulkan terdapat pengaruh signifikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM di Provinsi Maluku. Laisina et al., (2015) juga mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi utara. Prasetyo & Zuhdi, (2013) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pembangunan manusia. Muksalmina (2011) dalam Muliza et al., (2017) menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, daya beli masyarakat berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh yang mengemukakan tidak terdapat pengaruh signifikan belanja Pendidikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Penelitian Habeahan (2015) dalam Muliza et al., (2017) juga mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara) Periode 2004-2013. Penelitian Nur Isa Pratowo (2013) dan Astri et al., (2013) menyebut bahwa terdapat pengaruh signifikan antara belanja pemerintah terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh APK SMA Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Angka partisipasi kasar (APK) SMA berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo selama 2015 hingga 2019. Menurut publikasi BPS (2019) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Secara umum, APK digunakan sebagai indikator yang paling sederhana untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak diluar batas umur sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya siswa yang umurnya belum mencapai usia sekolah dengan jenjang pendidikan yang bersesuaian, siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

Jadi secara sederhana APK SMA hanya mengukur berapa proporsi siswa yang bersekolah di jenjang SMA tanpa melihat umur siswa tersebut, dan bisa jadi ada siswa yang mengulang pada jenjang pendidikan tersebut sehingga akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam hal ini indeks pembangunan manusia secara umum jika nilai APK yang diperoleh di bawah 100 persen. Bila membandingkan APK SMA dengan IPM Kabupaten Kota Gorontalo maka jelas terlihat bahwa APK SMA berfluktuasi selama 2015-2019.

Data BPS (2020) mencatat APK SMA secara umum mengalami fluktuasi. Namun beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato APK SMA terpantau terjadi peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan. Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten

Bone Bolango mengalami penurunan APK SMA selama 2015-2019. Hal ini bisa memungkinkan tidak signifikannya APK SMA dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota selama 2015-2019.

Tercatat Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo APK SMA dari tahun 2015-2019 masih lebih rendah dibandingkan dengan APK SD maupun APK SMP. Kabupaten Gorontalo di awal tahun 2015 sampai dengan 2017 APK SMA lebih rendah dibanding APK SD maupun SMP. Untuk Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango APK SMA terpantau berfluktuasi dari tahun 2015-2019.

APK pada jenjang pendidikan SD melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang sedang mengikuti pendidikan dasar ada yang berada di luar rentang 7-12 tahun. Terkadang orang tua sudah mendaftarkan anak yang belum mencapai umur 7 tahun ke sekolah dasar. Atau sebaliknya orang tua siswa yang telat mendaftarkan sekolah serta adanya siswa yang mengulang kelas. Hal tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan (BPS, 2019).

Pengaruh APM SMA Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan terdapat pengaruh signifikan APM SMA terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo selama 2015-2019. Publikasi Badan Pusat Statistik (2019) menyebut Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER) merupakan proporsi penduduk kelompok umur sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur sekolah tersebut. APM menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat tertentu yang sesuai dengan umurnya. APM juga dapat melihat penduduk umur sekolah yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar umur sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Bila disandingkan dengan APK, selisih antara APK dan APM tersebut menunjukkan besaran penyimpangan yang terjadi terhadap batasan usia sekolah pada jenjang yang semestinya (proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah).

Signifikannya APM SMA berpengaruh terhadap IPM dimungkinkan karena APM yang menghitung proporsi siswa yang bersekolah pada jenjang SMA sesuai dengan umurnya, asumsinya bahwa siswa yang berada pada jenjang SMA itu tidak mengulang sehingga kualitas siswa yang sedang menempuh pendidikan SMA dikategorikan baik. Hal ini tentu akan berimplikasi pada Indeks Pembangunan Manusia secara umum di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo selama 2015-2019.

Diketahui bahwa nilai APM SMA meskipun berfluktuasi namun fluktuasinya tidak sedalam yang terjadi pada APK SMA. Hal ini juga memungkinkan IPM bisa ikut terdorong meningkat karena fluktuasi APM SMA yang tidak terlalu dalam tersebut. Namun demikian, bila melihat data, maka secara umum lima kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Gorontalo APM SMA ada trend peningkatan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian Khotijah (2020) dalam (Dani et al., 2021) dengan judul penelitian “pemodelan regresi nonparametrik

truncated spline pada indeks pembangunan manusia di Jawa Timur” menjelaskan bahwa APM SMA berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa belanja pendidikan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia selama 2015-2019. Hal ini dimungkinkan meningkatnya anggaran pendidikan yang disertai dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja menurut fungsi pendidikan ini akan berdampak pada semakin tingginya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat.

Dari hasil analisis juga ditemukan bahwa angka partisipasi kasar (APK) SMA memberikan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo selama 2015-2019. APK SMA hanya mengukur berapa proporsi siswa yang bersekolah di jenjang SMA tanpa melihat umurnya tersebut, dan bisa jadi ada siswa yang mengulang pada jenjang pendidikan tersebut sehingga akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM) SMA memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo selama 2015-2019. Hal ini dimungkinkan karena APM yang menghitung proporsi siswa yang bersekolah pada jenjang SMA sesuai dengan umurnya, asumsinya bahwa siswa yang berada pada jenjang SMA itu tidak mengulang sehingga kualitas siswa yang sedang menempuh pendidikan SMA dikategorikan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Manusia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Manusia Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Indonesia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- United Nations Development Programme (UNDP). 2019. Human Development Report 2019. New York: UNDP

Jurnal:

- Arham, M. A., & Dai, S. I. S. (2019). Analysis of Funding, Education Performance, and Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Economia*, 15(2), 292-305. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i2.26351>
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Sri Indah Nikensari, SE, M.Si. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 77-102.
- Dani, A. T. R., Ni'matuzzahroh, L., Ratnasari, V., & Budiantara, I. N. (2021). Pemodelan Regresi Nonparametrik Spline Truncated pada Data Longitudinal. *Inferensi*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.12962/j27213862.v4i1.8737>
- Laisina, C., Masinambow, V., & Rompas, W. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap PDRB melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara

- Tahun 2002-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 193–208.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9472>
- Mahulauw, A. K., Santosa, D. B., & Mahardika, P. (2017). Pengaruh Pengeluaran Kesehatan Dan Pendidikan Serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 122.
<https://doi.org/10.22219/jep.v14i2.3850>
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Nur Isa Pratowo. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Indonesia*, 15–31.
- Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance*, 5(September), 615–622. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00072-5)
- Rakhmadhani, M. R. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kesenjangan Antar Daerah Dan Pembiayaan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangua Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 312.